

Meningkatkan Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Zakiyuddin Zakiyuddin *¹, Firzan Firzan², Yarmaliza Yarmaliza³, Teungku Nih Farisni⁴, Fitriani Fitriani⁵, Fitrah Reynaldi⁶, Maiza Duana⁷, Sufyan Anwar⁸

^{1,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Teuku Umar

²Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Teuku Umar Meulaboh

*e-mail: zakiyuddin@utu.ac.id

Abstract

Women in low socioeconomic societies are sometimes in a disadvantageous condition and even tend to be in a helpless position due to the lack of support from various parties. This helpless situation can be seen from the lack of opportunity in making a decision in his life including in making decisions relating to himself and the Family Planning program. This helplessness makes women in a marginal condition in the element of society. The lack of encouragement from women can also be seen in the participation of family planning programs. The decision to use contraception is more often determined by men. Even to become a family planning acceptor is also determined by other parties, especially men. Meanwhile, very few men are family planning acceptors. This phenomenon is due to the decision to become a KB acceptor in the hands of men, so there is reluctance if the men become KB acceptors. Family planning services are not only related to being a family planning acceptor, but also many programs relating to empowerment, especially women. Women's empowerment programs in family planning programs are related to empowerment activities which are subsequently linked to family life. The results with family planning programs are still few that can empower women. This consideration is due to the still strong dominance of men in the norms of everyday society.

Keywords: KB; Women; Empowerment

Abstrak

Kaum perempuan dalam kalangan masyarakat yang sosial ekonomi rendah terkadang berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan bahkan cenderung berada dalam posisi tidak berdaya dikarenakan minimnya dukungan berbagai pihak. Keadaan ketidakberdayaan ini dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan dalam mengambil suatu keputusan dalam kehidupannya termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya dan program Keluarga Berencana. Ketidakberdayaan ini menjadikan perempuan dalam kondisi yang marginal dalam elemen bermasyarakat. Kurangnya dorongan perempuan juga dapat dilihat dalam keikutsertaan program KB. Keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi lebih sering ditentukan oleh kaum laki-laki. Bahkan untuk menjadi akseptor KB juga ditentukan oleh pihak lain khususnya laki-laki. Sementara itu pihak laki-laki sangat sedikit yang menjadi akseptor KB. fenomena ini dikarenakan keputusan untuk menjadi akseptor KB ada ditangan laki-laki, sehingga ada keengganan jika pihak laki-laki yang menjadi akseptor KB. Layanan KB tidak hanya berkaitan dengan menjadi akseptor KB saja tetapi juga banyak program yang berkaitan dengan pemberdayaan khususnya perempuan. Program-program pemberdayaan perempuan dalam program KB berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan yang selanjutnya dikaitkan dengan kehidupan KB. Hasilnya dengan program KB masih sedikit yang dapat memberdayakan perempuan. Pertimbangan ini dikarenakan masih kuatnya dominasi kaum laki-laki dalam norma masyarakat sehari-hari.

Kata kunci: KB; Perempuan; Pemberdayaan

1. PENDAHULUAN

Persepsi kondisi sosial ekonomi dalam keluarga maupun masyarakat masih menempatkan kaum perempuan dalam kondisi marjinal. Rendahnya keahlian, kemampuan dan pengambilan keputusan yang sama perempuan akan mendapatkan diskriminasi baik itu dari segi upah maupun jam kerja. Selain itu juga program-program kesehatan dan ekonomi dari pemerintah selalu menempatkan laki-laki dalam prioritas untuk mendapatkan program tersebut. Akibatnya perempuan lebih banyak bergerak di sektor-sektor informal dari pekerjaan. Keadaan

ini menyebabkan perempuan tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Ketimpangan, persepsi dari perempuan kemudian menjalar juga dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga pemilik kekuasaan yang besar dalam keluarga. Suami mempunyai akses keluar dan pengambil keputusan dalam keluarga. Sedangkan istri sebagai subordinat adalah pengikut yang harus patuh dan terbatas ruang geraknya. Akibat lebih jauhnya perempuan tidak mempunyai kekuasaan baik dalam keluarganya maupun dalam masyarakat. Adapun perempuan tidak berdaya baik secara fisik dan mental untuk memperjuangkan hak-haknya maupun untuk berkarya dalam masyarakat.

Kewenangan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) BKKBN pada tahun 2004 tidak lagi bersifat sentralistik, hal ini sebagai salah satu bentuk otonomi daerah. Akibatnya program Keluarga Berencana (KB) menghadapi tantangan luar biasa berat, karena secara kelembagaan di tingkat kabupaten/kota tidak memiliki tingkat kesiapan yang sama. Lebih lanjut jumlah petugas Keluarga Berencana di lapangan semakin berkurang cukup drastis karena petugas Keluarga Berencana meninggalkan pekerjaannya tersebut dan beralih fungsi pada pekerjaan lain, seperti ada yang menjadi Camat, Kepala Desa, menjadi pejabat dan asisten pejabat, sehingga petugas KB yang tersisa saat ini persis anak ayam yang kehilangan induknya (Alimoeso 2009). Berbagai kondisi di atas apabila tidak segera ditanggulangi dapat menyebabkan dampak yang meluas hingga berpengaruh pada keberhasilan program KB. Program Keluarga Berencana harus terus dipantau karena menjadi program pemerintah secara berkelanjutan untuk mengatur pertumbuhan penduduk agar dapat sejalan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Program pemerintah terutama dalam Program KB agar terus berhasil tentunya butuh dukungan dari berbagai pihak serta strategi.

Ketidakterdayaan perempuan dalam keluarga terlihat dari sulitnya perempuan untuk melakukan kegiatan diluar keluarganya. Kondisi ini diperparah dengan budaya yang berkembang seperti di masyarakat termasuk di Aceh dengan slogan “banyak anak banyak rejeki”. Slogan ini disatu sisi menempatkan keluarga untuk lebih mudah mengerjakan pekerjaan dalam rangka menghidupi keluarga. Peran kepala keluarga akan sangat terbantu dengan banyaknya anak, karena anak merupakan “asset” tenaga kerja. Di sisi lain dengan anak yang banyak peran ibu menjadi lebih berat, karena harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Dengan banyaknya anak yang terlahir dalam suatu keluarga, perempuan akan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam keluarga dengan merawat dan mengasuh anak-anaknya. Sementara itu laki-laki lebih banyak menghabiskan waktunya di luar keluarga.

Tujuan Program, yaitu : Meningkatkan status kesehatan, Pendidikan perempuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat, meningkatkan wawasan kebangsaan.

Kegiatan ini bermaksud sebagai pemberian penghargaan kepada para pelaksana program pemberdayaan perempuan untuk mendorong dan meningkatkan program tersebut sesuai kebijakan yang digariskan. Sedangkan, tujuan di evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan program KB dan manfaatnya, dengan fokus memperoleh gambaran efektifitas pelaksanaan, dampak program terhadap kesetaraan dan keadilan gender, serta peran, akses, kontrol dan manfaat yang dirasakan perempuan beserta keluarga di desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu adanya kegiatan yang bertujuan untuk dapat menekan ketimpangan, gender perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat di Gampong Kula Baro, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.. Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang diharapkan dapat meningkatkan program keberdayaan perempuan. Pembatasan kelahiran anak dalam keluarga diharapkan perempuan dapat berkiprah baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu pembatasan kelahiran anak dalam keluarga juga akan lebih menjamin masa depan anak itu sendiri. Diskriminasi perempuan dalam keluarga akan terkikis jika jumlah anak dalam keluarga terbatas. Dengan kondisi ini kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki

2. METODE

Teknik yang digunakan dalam menentukan khalayak sasaran adalah mengundang sejumlah tokoh masyarakat, kader kesehatan dan partisipasi pasangan usia subur (PUS) khusus kaum perempuan di Gampong Kula Baro, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang menjadi peserta dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan program Keluarga Berencana (KB).

2.1 METODE CERAMAH

Sosialisasi tentang cara peningkatan informasi pemberdayaan perempuan tentang bagaimana mengembangkan dan meningkatkan usaha ekonomi keluarga yang ada seperti kegiatan memelihara hewan peliharaan yang bernilai ekonomi, kerajinan tangan, ketrampilan dan pengelolaan bank sampah dengan memanfaatkan sampah dari lingkungan sekitar dengan metode 3R (*Reus, Reduce dan Recycle*) serta anjuran mengikuti program KB.

2.2 METODE VISUAL

Memberikan contoh video langsung Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dapat diterapkan dikalangan masyarakat khususnya ibu-ibu.

2.3 METODE DISKUSI

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya dan berdiskusi tentang informasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang efektif dan efisien.



Gambar 1. Sosialisasi meningkatkan pemberdayaan perempuan dan KB



Gambar 1. Peserta Bersama mahasiswa Prodi I sosialisasi pemberdayaan perempuan dan KB

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bertujuan Meningkatkan Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Gampong Kula Baro, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

Kegiatan sosialisasi dalam rangka pengabdian masyarakat yang dibantu oleh para mahasiswa, adapun jadwal kegiatan ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 Juli tahun 2018 pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB yang bertempat di balai Desa Gampong Kuala Baro, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah peserta Ibu-ibu berjumlah 20 orang serta para tokoh masyarakat dan kader Kesehatan.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dihadiri oleh 20 ibu tersebut mendapat tanggapan beragam dari para ibu terhadap kegiatan yang dianggap penting dan dapat termotivasi para ibu, di buktikan dengan sangat antusias mereka untuk berkenan hadir pada saat sosialisasi berlangsung serta peran aktif para ibu pada saat diskusi. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta manfaat dalam segi kesehatan keluarga.

3.1 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pemberdayaan merupakan sebuah kata yang sering kali mempunyai arti yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena kata pemberdayaan menunjukkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang perlu ditolong karena ketidakmampuannya. Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata "empowerment" yang lebih menekankan pada "mengambil alih kekuasaan" (Ratna Saptari, 1997). Jadi pengertian pemberdayaan seolah mempunyai konotasi negatif, yaitu mengambil alih kekuasaan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain yang dirasakan mempunyai kekuasaan yang lebih banyak. Pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tan yang melihat pemberdayaan sebagai suatu proses menantang hubungan kekuasaan yang ada dan memperoleh penguasaan yang lebih besar atas sumber-sumber kekuasaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan suatu redistribusi kekuasaan yang ada, dalam kasus di sini kekuasaan yang ada dalam keluarga.

3.2 PROGRAM KB

Program KB adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan pertumbuhan penduduk secara bertahap dengan mengendalikan fertilitas PUS

baik dengan mengatur jarak kelahiran anak, mencegah kehamilan bagi yang menderita sakit dan menyetop kelahiran bagi yang sudah mempunyai dua atau tiga anak. Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Program KB mempunyai empat dimensi, yakni : pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan ketahanan keluarga,

3.3 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB yang tinggi diharapkan tujuan dari program KB dapat tercapai. Salah satu indikator keberhasilan dari program KB adalah menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk. Partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam program KB merupakan strategi yang potensial dalam meningkatkan akses perempuan serta transformasi budaya (Hikmat, 2004).

4. KESIMPULAN

Perempuan dalam masyarakat yang patriarkat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bahkan cenderung berada dalam posisi tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan dalam mengambil keputusan dalam hidupnya termasuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Ketidakberdayaan ini menjadikan perempuan dalam kondisi yang marginal dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakberdayaan perempuan ini juga dapat dilihat dalam program KB. Keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi lebih banyak ditentukan oleh pihak laki-laki. Bahkan untuk mejadi akseptor KB juga ditentukan oleh pihak lain khususnya laki-laki. Sementara itu pihak laki-laki sangat sedikit yang menjadi akseptor KB. Hal ini dikarenakan keputusan untuk menjadi akseptor KB ada ditangan laki-laki, sehingga ada keengganan pihak laki-laki menjadi akseptor KB. Program KB tidak hanya berkaitan dengan menjadi akseptor KB saja tetapi juga banyak program yang berkaitan dengan pemberdayaan khususnya perempuan. Program-program pemberdayaan perempuan dalam program KB berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan yang selanjutnya dikaitkan dengan kehidupan KB. Hasilnya dengan program KB masih sedikit yang dapat memberdayakan perempuan. Hal ini dikarenakan masih kuatnya dominasi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dapat disarankan masih perlunya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan baik itu untuk laki-laki maupun perempuan mengenai Keluarga Berencana (KB). Sosialisasi ini perlu dilakukan karena masih banyaknya masyarakat baik laki-laki maupun pengetahuan yang perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai Keluarga Berencana (KB) sehingga pada akhirnya peserta Keluarga berencana (KB) bukan sebagai suatu keterpaksaan tetapi merupakan suatu kebutuhan. Perlu dibuat kebijakan mengenai peserta Keluarga Berencana (KB) yang diperuntukkan bagi laki-laki. Sebagian contoh kebijakan bahwa laki-laki yang sudah berumur tertentu harus menjadi peserta Keluarga Berencana, atau bagi Pegawai Negeri Sipil selain harus mempunyai anka dua orang juga harus laki- lakinya menjadi peserta aktif Keluarga berencana (KB). Mendorong lebih banyak lagi perempuan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan khususnya untuk akseptor dan PUS. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah persyaratan untuk terlibat dalam program pemberdayaan perempuan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Geuchik, Kader, Tokoh Masyarakat, Gampong Kuala Baro, Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kesempatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hikmat, H. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat (edisi revisi), Bandung: Humaniora utama press.

Ratna.S. (1997). Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Jakarta: PT. Anem Kosong Anem

Sudibyo. A.(2014). BKKBN Sebut Angka Kematian Ibu Masih Tinggi. Diakses 18 Februari 2020